



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lakip



Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : blhkepri@yahoo.com Website : <https://dlhk.kepriprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadira: Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat diselesaikan tepat waktu. (LKjIP) ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan yang professional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari pertanggung jawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mendukung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tentu Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna dalam menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	5
1.5 Sumber Daya Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.6 Isu Strategis.....	14
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Program Kegiatan dan indikator kinerja	20
2.2 Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Kepulauan Riau	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja.....	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	10
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	24
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	26
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.....	27
Tabel 3.1	Skala pengukuran.....	30
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	30
Tabel 3.3	Indikator dan Parameter IKLH.....	33
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 s/d 2024.....	34
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanen Provinsi Kepulauan Riau.....	36
Tabel 3.6	Evaluasi pencapaian sasaran 5 (lima) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.....	46
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran	48
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program	64
Tabel 3.9	Realisasi anggaran per Sasaran.....	65

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang peaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun

- 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

1.4. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

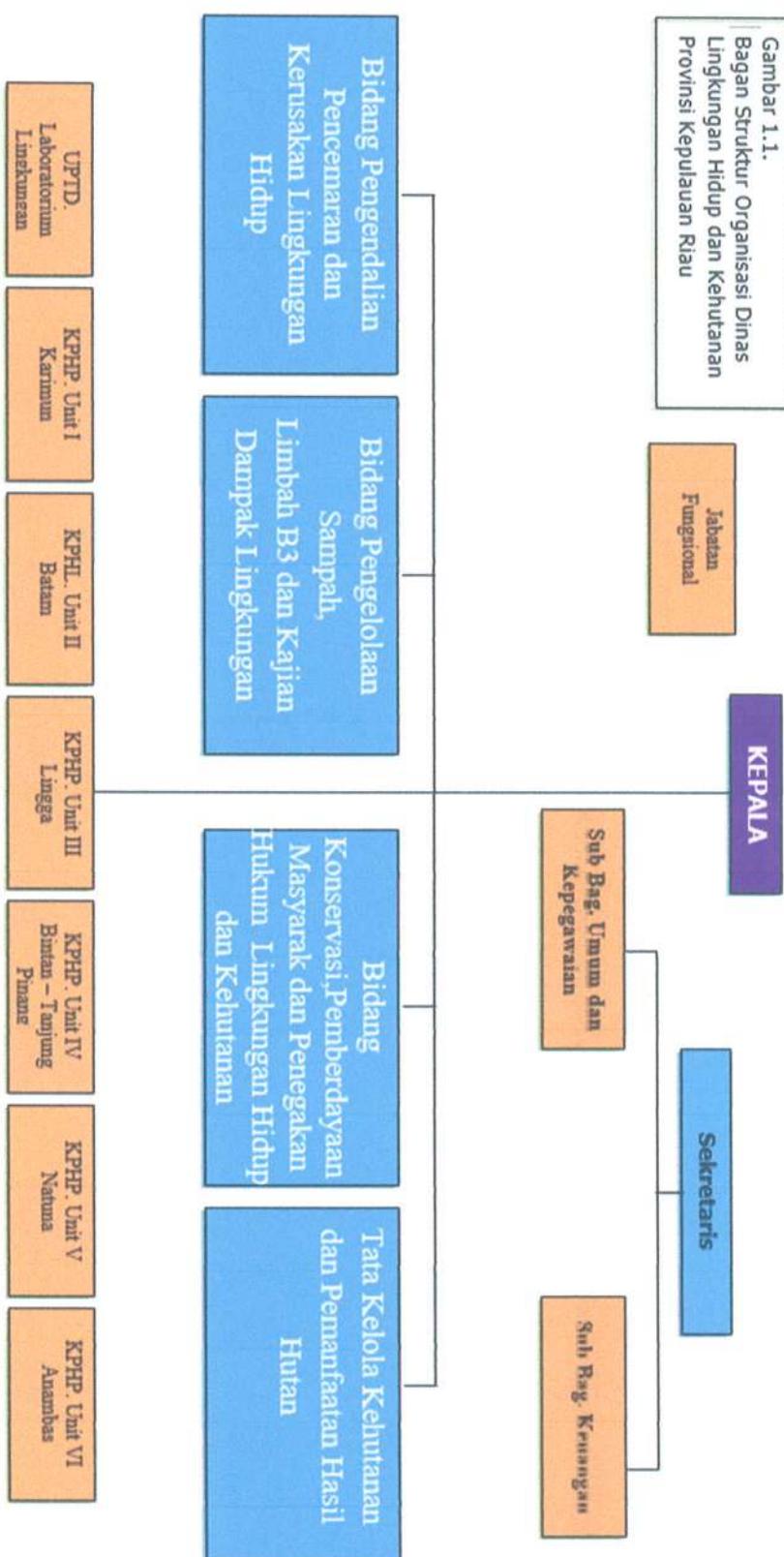
Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
- g. Pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
4. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
6. UPTD Laboratorium Lingkungan;
7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Karimun;
8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit II Batam;
9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit III Lingga;
10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan -Tanjungpinang;
11. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit V Natuna;
12. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit VI Anambas;
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau



1.5. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 3 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas atau THL. Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 186 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari pejabat eselon sebanyak 34 orang, PNS sebanyak 132 orang, staf PTT sebanyak 18 orang dan staf THL sebanyak 36 orang.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beraçam, mulai tingkat pendidikan terendah (SMA) hingga tertinggi (S2).

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Jumlah
1	S3	-	-	-	-
2	S2	15	-	-	15
3	S1	62	12	11	85
4	D4	-	-	-	-
5	D3	6	1	4	11
6	D2	-	-	-	-
7	D1	-	-	-	-
8	SMA	49	5	16	70
9	SMP	-	-	2	2
10	SD	-	-	3	3
Jumlah Total		132	18	36	186

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan II sampai dengan Golongan IV seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2024

No	Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-
4	Pembina Tk. I (IV/b)	4	-	4
5	Pembina (IV/a)	9	-	9
6	Penata Tk. I (III/d)	27	15	42
7	Penata (III/c)	8	5	13
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	6	4	10
9	Penata Muda (III/a)	10	4	14
10	Pengatur Tk. I (II/d)	30	3	33
11	Pengatur (II/c)	4	1	1
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
14	Juru Tk. I (I/d)	-		
15	Juru (I/c)	-		
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-		
17	Juru Muda (I/a)	-		
	Jumlah Total	100	32	132

2. Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah daftar aset inventaris yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penunjang operasional kedinasan.

Tabel 1.3. Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Barang	Jumlah Unit
1	AAS Attachment for HG Determination and 16 Lamp	1
2	AC Split	4
3	AC Unit	9
4	Air Conditioning Unit	7
5	Alat Dapur Lain-lain	30
6	Alat Destilasi Air	1
7	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	1
8	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	4
9	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	4
10	Alat Lab. Lingkungan Lain-lain	69
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	55
12	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	35
13	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1
14	Alat Pendingin Lain-lain	2
15	Alat Penggilingan Padi	1
16	Alat Penghancur Kertas	1
17	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	2
18	Alat Penyimpanan Lain-lain	1
19	Alat Peraga Bahasa Indonesia Lain-lain	1
20	Alat Perlindungan Lain-lain	61
21	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6
22	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1
23	Amplifier	1
24	Anemometer	1
25	Anemometer Portable Digital	1
26	Audio Tape Reel Recorder	1
27	Automatic Timer	1
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
29	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
31	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1
33	Beaker	1
34	Botol	100
35	Botol Pencuci	1

36	Botol Plastik	20
37	Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain	1
38	Buku Umum Lain-lain	6
39	Burette	22
40	Camera + Attachment	4
41	Camera Electronic	15
42	Camera Photo Micrograph	1
43	Camera Video	2
44	Cardiac Output	110
45	Cawan Petri	20
46	Cawan Porselin	20
47	CCIV	8
48	Conductimeter	3
49	Conductivity Meter	3
50	Container	
51	CPU	2
52	Daun Pintu Alumunium	5
53	Dinding/Sekat Besi	2
54	Dinding/Sekat Gypsum	1
55	Dinding/Sekat Kayu	238
56	DO Meter	8
57	Dry Type Gas Meter	1
58	Dump Truck	6
59	Elektroda Tembaga (Voltameter)	6
60	Emergency Kit	1
61	Ensykopedia Kamus, Buku Referensi	14
62	Erlenmeyer Plastik	26
63	Exhaust Fan	4
64	Filling Besi/Metal	21
65	Filter	3
66	Filtration Unit	1
67	Garu	18
68	Gas Sampler	2
69	Gedung Pos Jaga Permanen	7
70	Global Positioning System (GPS)	37
71	Gordyn	3
72	Handphone	2
73	Handy Talky	2
74	Handycam	2
75	Harddisk Internal	4
76	High Volume Air Sampler	1
77	Hot Plate Stirrer	1
78	Hub	3
79	Ilmu Pengetahuan umum	165
80	Instrument Probe/Sensor Lain-lain	2

81	Instrument Tray	5
82	Jeep	1
83	Kabel Listrik	2
84	Kaca Riben	5
85	Karpet	3
86	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3
87	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3
88	Keyboard	1
89	Kompas	10
90	Konstruksi Pagar	1
91	Kursi Biasa	31
92	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
93	Kursi Kerja	65
94	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9
98	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9
99	Kursi Rapat	58
100	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	30
101	Kursi Tamu	1
102	Labu Taka r	23
103	Lain-lain	1
104	Lap Top	35
105	Layar Proyektor	3
106	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	13
107	Lemari Asam	1
108	Lemari Besi	1
109	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3
110	Lemari Es	9
111	Lemari Kayu	1
112	Lemari Pakaian	1
113	Lemari Penyimpanan	18
114	Loudspeaker	2
115	Magnetic Strips & Bars	6
116	Masker Oksigen	15
117	Meja Besi/Metal	15
118	Meja Biro	16
119	Meja Kayu/Rotan	37
120	Meja Kerja	21
121	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7
122	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
123	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
124	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8
125	Meja Makan	1
126	Meja Panjang	2

127	Meja Rapat	3
128	Mesin Absen (Time Recorder)	3
129	Mesin Absensi	1
130	Mesin Jahit	7
131	Mesin Ketik Listrik Portable	1
132	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
133	Mesin Pompa Air	2
134	Microphone	11
135	Modem	1
136	Monitor	1
137	Mouse	4
138	Multi Chaneel Analyser	1
139	Neraca Dengan Digital Display	1
140	Note Book	31
141	P.C Unit/ Komputer IC	71
142	Pakaian Panas/Lengkap	7
143	Papan Nama Instansi	17
144	Papan Pengumuman	1
145	Peralatan Jaringan Lain-lain	16
146	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
147	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1
148	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	8
149	Personal Komputer Lain-lain	2
150	Pesawat Telephone	1
151	pH Meter	7
152	Pick Up	4
153	Plankton Net	2
154	Ploter	2
155	Pocket Altimeter	1
156	Power Supply	2
157	Power Supply Microphone	1
158	Printer	82
159	Proyektor + Attachment	6
160	Rak Kayu	4
161	Rak-rak Penyimpanan	2
162	Refractometer	1
163	Remote Control Unit	1
164	Rol Meter	2
165	Router	1
166	Scanner	2
167	Sedan	3
168	Selang Penyemprot Air	13
169	Sepatu (International Safety Tester)	35
170	Sepeda Motor	44
171	Sofa	6
172	Sound Level Meter	1

173	Speaker Aktive Komputer	4
174	Spectrophotometer	1
175	Speed Boat	3
176	Staion Wagon	1
177	Sumber Radiasi Lain-lain	1
178	Switch Hub	5
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
180	Tanaman Perkebunan Lain-lain	1
181	Tandon Air	1
182	Telephone Mobile	1
183	Televisi	2
184	Teralis	1
185	Teropong	1
186	Thermometer	1
187	Tim bangan	4
188	Turbidi Meter	2
189	UPS	23
190	UV/VIS Spectrophotometer	1
191	Water Sampler	2
192	Wireless Lan (Internal Card)	1
193	Wireless Lan (USB)	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1.6. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup 4. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya	a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat Masyarakat a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas c. Terbatasnya sarana prasarana laboratorium d. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/ DAS dengan baik b. Kondisi hutan yang masih

	pengelolaan sumberdaya alam	c. rentan terhadap Gangguan Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam
	5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	a. Belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Kepulauan Riau b. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA c. Pengelolaan TPA yang belum optimal
	6. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas. b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas
2. Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal. c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibikan lahan dan/atau okupasi lahan
	2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum	a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal. b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik

	optimal	gangguan alam maupun manusia.
3. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi		c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output* dan sebagian *outcome*. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya capaian kinerja (*performance results*) kegiatan-kegiatan tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJILAN KINERJA

2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Adapun visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi

✓ Visi

Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 : **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".**

✓ Misi

Dalam rangka mewujudkan visi **" Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**, misi yang yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, **Berwawasan Lingkungan** dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka perlu penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka

melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maka program yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).**
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

9. Program Pengelolaan Persampahan

10. Program Pengelolaan Hutan

11. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut (Tabel 2.1):

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capai� Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,00	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	N/A	20	20	20	100	100	100
3	Indeks Kualitas Air Laut	N/A	76,10	76,75	77,39	78,04	78,04	78,04
4	Indeks Kualitas Air	54,00	56,60	56,70	56,80	56,90	56,90	70,10
5	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,59	88,14	88,25	83,35	88,46	88,56	88,67
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,06	59,07	59,08	59,09	59,10	59,11	59,12
7	Persentase ketersediaan data Keaneharagaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0	0	14,28	14,28	28,57	42,58	57,17
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	20	26,27	33,33	33,33	40,00	40,00	46,67
9	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	0	28,57	42,85	57,14	71,43	85,71	85,71
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	83,33	57,14	57,14	71,43	100	100	100
13	Persentase Pengurangan Sampah	22	24	26	27	28	30	30
14	Persentase Penanganan Sampah	75	73	73	72	71	70	70
15	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	25,31	27,00	27,10	27,20	27,32	27,40	27,50
16	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	25,31	27,00	27,10	27,20	27,32	27,40	27,50
17	Rehabilitasi Lahan Kritis	5	5	5	5	5	5	25
18	Jumlah kelompok pengelolaan	88	500	500	500	30	30	30

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
19	hutan oleh masyarakat Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2	2	2	2	2	2	2
20	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B

Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Adapun masalah yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ;

- Sebagian waduk di wilayah Kepulauan Riau memiliki status air tercemar sedang
- Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan
- Meningkatnya pencemaran laut dan pantai di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

2. Permasalahan Terkait Konservasi, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Adapun masalah yang terkait dengan Konservasi, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah ;

- Meluasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri
- Masih rendahnya cakupan rehabilitasi dibanding luas areal kerusakan lahan.
- Kerusakan terumbu karang dan lamun di kawasan pesisir
- Terjadinya kerusakan hutan mangrove
- Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau wilayahnya terhadap terjadinya perubahan iklim
- Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau
- Masih adanya pengaduan masalah lingkungan yang belum terselesaikan

3. Permasalahan Terkait Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- Adapun masalah yang terkait dengan Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan adalah ;
- Tingginya tingkat kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal logging, perladangan berpindah, dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
 - Belum adanya Persetujuan DPR RI pada usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan yang luas dan bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 Ha yang telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai dasar terbitnya perubahan Keputusan terkait kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
 - Masih adanya usaha industri kayu yang belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
 - Belum beroperasinya Kesatuan Pengelolaan (KPH) sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak
 - Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan
4. Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
- Adapun masalah yang terkait dengan Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah ;
- Meningkatnya produksi sampah rumah tangga dan belum optimalnya pengelolaan sampah oleh kabupaten/kota
 - Belum tersedianya TPA regional dan sarana prasarana pendukungnya terutama di Pulau Bintan
- Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara la 1 :
1. Meningkatnya pencemaran lingkungan perairan akibat pembuangan limbah *sludge oil*
 2. Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan.
 3. Luasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri

4. Terjadinya kerusakan pada kawasan hutan

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,18
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (Hektar)	27,32
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai Sakip (Prediksi)	68,50

Adapun program yang mendukung dalam rangka mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Anggaran Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.392.049.000,-	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	366.213.910,-	APBD
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	214.235.911,-	APBD
4. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	181.589.541,-	APBD
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.720.600,-	APBD
6. Program pengelolaan persampahan	298.306.000,-	APBD
7. Program Pengelolaan Hutan	653.980.300,-	APBD
8. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	676.393.167,-	APBD

Untuk perjanjian kinerja pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,18
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	PDRB Sektor Kehutanan (Milyaran/Rp)	27,32
		Meningkatnya Akses pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (kelompok)	30
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Renja dan Laporan OPD Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 	12 Bulan 2 Dokumen 1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	12 Bulan
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
1	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	78,04
2	Meningkatnya Kualitas Air Baku	Indeks Kualitas Air	56,90
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88,46
4	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko LH	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan
5	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kepri	1 Dokumen
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pengamanan air bersih, udara ambien, tutupan lahan, dan air laut Tersedianya peralatan AQMS	1 Laporan
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya Penyusunan Inventarisasi GRK dan Pemetaan Kampung Iklim	1 Laporan
8	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Perusahaan

No	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan
Bidang Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Tindakan Dampak Lingkungan			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket
Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1.	Meningkatnya Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH	Luas kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha
2.	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup	71,43 %
3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS	2 kali
4	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan
5	Terpenuhinya reabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	Laporan atas hasil pembinaan dan /atau pengawasan rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan
Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan			
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen
2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan PBPHH (kayu dan/atau IHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen

2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	PDRB Sektor Kehutanan terhadap PDRB Harga berlaku (Miliar)	27,32

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses akutabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

Tabel 2.6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	366.213.910,00
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	366.213.910,00
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	214.235.911,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911,00
Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	50.720.600,00
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	50.720.600,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi	181.589.541,00
	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541,00

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan : Penanganan Sampah di TPA/TFST Regional	1.298.306.000,00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TFST Regional	1.298.306.000,00
Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.606.000,00
	Sub Kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.606.000,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00
	Sub Kegiatan : Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	117.248.000,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	117.248.000,00
	Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	95.940.000,00
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	95.940.000,00
Program Pendidikan dan Pelatihan, Pernyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kegiatan : Pelaksanaan Pernyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	698.494.000,00
	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.752.167,00
	Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	31.668.000,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja adalah proses sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan strategi OPD. Penghitungan persentase pencapaian ren:ana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dan kondisi :

1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya capaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

No	Katagori	Katagori Capaian
1	X > 100%	Sangat Baik
2	75 < X < 99	Baik
3	55 < X < 74	Cukup
4	X < 55	Kurang

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Untuk pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) 2021 – 2025 selama 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini :

3.1.1 Membandingkan Capaian kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut ini adalah capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18	75,05	106,94	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100	100	100	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78,04	85,53	106,90	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,90	53,98	94,87	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024	Keterangan
			Target	Realisasi		
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,46	92,12	104,14	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,10	66,18	111,98	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	28,57	28,57	100	Sangat Baik
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40,00	40	100	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	71,43	71,43	100	Sangat Baik
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	71,43	125	175,01	Sangat Baik
		Persentase Pengurangan Sampah	28	17,01	60,76	Cukup
		Persentase Penanganan Sampah	71	71,01	100,01	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	27,32	26,29	96,23	Baik
		Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)	27,32	26,29	96,26	Baik
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5	5	100	Sangat Baik
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	30	30	100	Sangat Baik
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	2	2	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B (68,50)	BB (75,80)	109,49	Sangat Tinggi

Dari tabel 3.2 di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai target bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi ada juga yang rendah capaiannya diantaranya adalah :

- Persentase Pengurangan Sampah
- Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari indikator sasaran kinerja utama yang telah ditargetkan pada tahun 2024 terealisasi mencapai 106,94 % untuk Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 175,01 % untuk indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 100,01% untuk indikator Persentase Penanganan Sampah, 96,23% untuk indikator Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah), 100% untuk indikator Rehabilitasi Lahan Kritis, serta 100% untuk indikator Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Mewujudkan Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

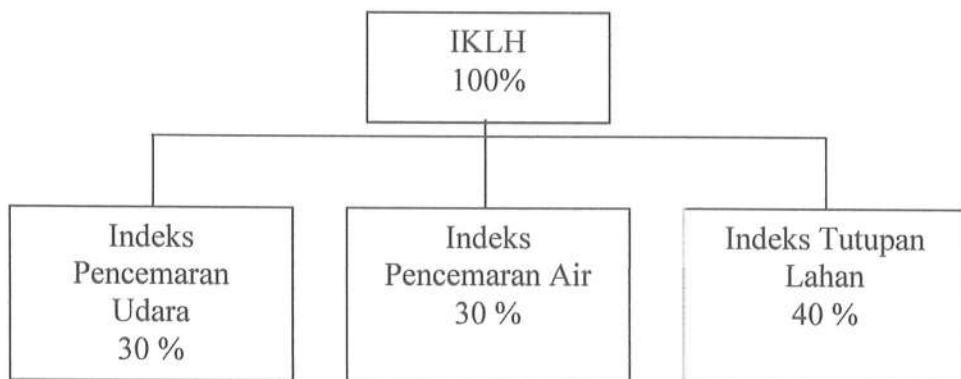
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70,18	75,05	106,94%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University* (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.

Struktur IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator, hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).



Tabel 3.3. Indikator dan Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1	Kualitas Udara	SO ₂	30%	
		NO ₂		
2	Kualitas Air	TSS	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		BOD		
		COD		
		DO		
		Fosfat		
		Total colil		
		Fecal colil		
3	Tutupan Hutan	Luas Lahan	40%	

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DC, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKLH Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
IKLH Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sudah tercapai dengan cukup baik. Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2022–2024 seperti tabel berikut :

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2022 dan 2024)

Berikut ini adalah capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2022 dan 2024).

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 s/d 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	74,13	74.26	75,05
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	50	20	100
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,56	81.81	85,53
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,79	54.93	53,98
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	90,27	90.13	92,12
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,00	66.97	66,18
		Persentase ketersediaan data	0	0	28,57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
		Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau			
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40 %	50%	40
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100 %	100%	100
		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	100 %	71,43	71,43
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100 %	100%	100
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100 %	100%	125
		Persentase Pengurangan Sampah	14,82 %	14.43%	17,01
		Persentase Penanganan Sampah	72,42 %	67.65%	71,01
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)	27,12	25,99	26,29
		Rehabilitasi Lahan Kritis	330	5	5
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500	30	30
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (DAS)	2	2	2
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B (68,50)	BB (71,60)	BB (75,80)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara umum sangat baik untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini manunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga sangat baik. Indikator ke-2 yaitu meningkatnya PDRB sektor kehutanan (dalam miliar rupiah) diperoleh hasil capaian kinerja sangat baik yaitu 26,29 miliar rupiah (96,23%) dari target 27,32 miliar rupiah.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut ini capaian kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024	Keterangan
			Target PJMD	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18	75,05	106,94 %	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100	100	100 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78,04	85,53	106,90 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,90	53,98	94,87 %	Baik
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,46	92,12	104,14 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	59,10	66,18	111,98 %	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	28,57	28,57	100 %	Sangat Baik-
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40,00	40	100 %	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan	71,43	71,43	100 %	Sangat Baik
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	71,43	125,01	175,01%	Sangat Baik
		Persentase Pengurangan Sampah	28	17,01	60,76 %	Cukup
		Persentase Penanganan Sampah	71	71,01	100,01 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	27,30	26,29	96,26 %	Baik
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5	5	100 %	Sangat Baik
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	30	30	100 %	Sangat Baik
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	2	2	100 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B 68,50)	BB (75,80)	109,49 %	Sangat Baik

Dari tabel 3.5 di atas, pada tahun 2024 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2024 adalah 75,05 dan realisasi ini melebihi target RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 70,18. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 26,29 (96,26 %)

1. Informasi Keberhasilan

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :

- | | |
|-------|-------------------------|
| - TSS | - Total Fosfat |
| - pH | - NO ₃ , dan |
| - DO | - Fecal Coli |
| - BOD | - COD |

2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter :

- SO₂ dan
- NO₂;

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Crto-Fosfat.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,05 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 70,18 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 5.10. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4

indikator yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53.98 dengan rating Sedang;

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengeringan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dar influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indek Kualitas Air (IKA) tidak mencapai target RPJMD.

- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92.12 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU.

Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66.18 dengan rating Sedang;

Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL,. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau.

Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85.53 dengan rating Baik.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*landbase pollution*)..

b. Alternative solusi yang dilakukan

➤ Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak

perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

➤ Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengeringan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat ditingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantauan dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sel Jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

➤ Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

➤ Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang.

Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung

Keberhasilan pencapaian kinerja IKLH Tahun 2024 sebesar 75.05 dari target 70.18 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut :

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.589.541	177.987.091	98.02
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541	177.987.091	98.02
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.298.306.000	52.997.000	4.08

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000	52.997.000	4.08
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional realisasi fisik 100 % tunda bayar dikarenakan tidak tersedianya dana				
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.235.911	151.298.245	70.62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911	151.298.245	70.62
4	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.385.851.467	1.276.647.767	99.52
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300	384.177.286	90.36
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000	89.728.803	93.53
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.725.167	585.448.878	90.18
	Pencegahan dan Pernbatasan Kerusakan Hutan	220.000.000	217.292.800	100
JUMLAH		1.905.081.841	615.161.377	68.06

Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 tahun Berjalan dengan tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Capaihan	Target	Realisasi									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,20	67,00	96,82	69,80	73,19	104,86	69,73	74,13	106,31	69,73	74,26	106,16%	70,18	75,05
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	-	-	-	-	-	-	20	50	250	20 %	20%	100%	100	100 %
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKA/L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	54,00	-	-	56,60	-	56,70	56,79	100,16	56,70	54,93	96,71%	56,90	53,98
5	Indeks Kualitas Udara Ambien (IKAJ)	N/A	90,59	-	-	88,14	-	88,25	90,27	102,29	88,25	90,13	102,01%	88,46	92,12
6	Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	-	59,06	-	-	59,07	-	59,08	58,00	98,17	59,08	66,97	113,33%	59,10	66,18
7	Persentase ketersediaan data Keseimbangan Raya di Provinsi Kepulauan Riau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	28,57	0	0	28,57	28,57	100 %
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dianwasi	N/A	20	N/A	N/A	26,67	N/A	33,33	40	120,01	40%	50%	125%	40,00	40 %
9	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	N/A	100	-	100	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
10	Persentase Kab/ Kota yang merintih Penghargaan	N/A	100	N/A	N/A	26,57	-	42,85	42,85 %	100 %	71,43	42,85	59,98%	71,43	71,43
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	N/A	100	N/A	100	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	N/A	83,33	N/A	N/A	57,14	N/A	57,14 %	100 %	175,01	71,43 %	100%	100%	71,43	125,01
13	Persentase Pengurangan Sampah	N/A	20	N/A	N/A	24	N/A	25 %	14,82	57,00 %	26 %	14,43%	55,5%	28	17,01
14	Persentase Penanggangan Sampah	N/A	75	N/A	N/A	74	N/A	73 %	74,42 %	99,21 %	73 %	67,65%	93,95%	71	71,01
15	Meningkatnya PDDB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)	-	26,90	-	-	28,34	-	27,10	27,12	100,07 %	27,10	27,12	99,70%	27,30	26,29
16	Rehabilitasi Lahan Kritis	230	300	130,4	230	300	130,4	5	330	6,600 %	5 Ha	2 Ha	2 Ha	5	100 %
17	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh Masyarakat	N/A	88,00	N/A	N/A	500	N/A	500	100 %	500 Ha	110,73 ha	22,15%	30	30	100 %

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
18	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	N/A	2 DAS	N/A	N/A	2 DAS	N/A	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	3 DAS	3 DAS	2	2	100 %	
19	Nilai SAKIP	N/A	B	N/A	B	BB	B	B	B	B	BB	71.55 (68,50)	BB (75,80)	109,49 %			

Dari tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja tahun 2024 rata-rata tercapai melebihi target, namun ada juga indikator kinerja yang tidak tercapai diantaranya ;

- Persentase Pengurangan Sampah
- Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)

Untuk persentase pengurangan sampah belum mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber/ rumah tangga (memilah sampah dari rumah)
- Minimnya fasilitas serta anggaran penanganan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum ada teknologi pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum adanya tenaga penyuluh lingkungan

- Kab/Kota ada yang belum menginputkan atau mevalidasi di dalam aplikasi SIPSN. Sedangkan tidak tercapainya target PDRB sektor kehutanan Tahun 2024 karena Kontribusi PDRB terbesar pada produksi arang di Kab. Lingga dan karimun, Produksi arang Kab Lingga dan karimun terhenti karena PNBP kayu bakau sebagai salah legalitas syahnya penebangan tidak dapat dibayarkan melalui aplikasi SIPUHH.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar 37.662.093.914,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. **35.376.353.110,00** (yaitu terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp. 27.436.768.874,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.939.584.236,00 serta belanja modal sebesar Rp. 2.285.740.804 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 34.572.466.130,00** atau sebesar 91,80%, dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA OPERASI	35.376.353.110,00	32.517.066.130,00	91,80	2.859.286.980,00
1	Belanja Pegawai	27.436.768.874,00	26.532.474.269,00	96,70	904.294.605,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.939.584.236,00	5.984.591.861,00	75,38	1.954.992.375,00
3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
II	BELANJA MODAL	2.285.740.804,00	2.055.400.000,00	89,92	230.340.804,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.285.740.804,00	2.055.400.000,00	89,92	230.340.804,00
JUMLAH		37.662.093.914,00	34.572.466.130,00	91,80	3.089.627.784,00

Dengan capaian realisasi secara keseluruhan sebesar **Rp34.572.466.130,00** meliputi I. Belanja Operasi sebesar Rp**32.517.066.130,00,00 (91,80%)** dengan rincian : a. Belanja Pegawai sebesar Rp26.532.474.269,00 (96,70%), b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.984.591.861,00 (**75,38%**); II. Belanja Modal sebesar Rp**2.055.400.000,00 (89,92%)**, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah mampu mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan capaian realisasi anggaran di atas 90%. Realisasi Belanja yang mencapai 91,80%, terdapat 1 (satu) kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 50 % yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga).

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari Kegiatan Pengelolaan Rencanan Tata Hutan (KPH) (UPTD Unit III Lingga). Pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dari jumlah anggaran Rp. 35.512.227,- realisasi anggaran 25.191.000,- atau hanya 44,02%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ini, berikut disajikan tabel Ikhtisar Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan persentase tingkat capaian sebagai berikut:

Tabel 1: Ikhtisar Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
Belanja Operasi Belanja Pegawai	27.436.768.874,00	26.532.474.269,00	96.70%
Jumlah Belanja Operasi	27.436.768.874,00	26.532.474.269,00	96.70%

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari Gaji Pokok PNS dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Honorarium Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Dengan total anggaran sebesar **6.775.016.741,00** dan realisasi sebesar **6.682.820.651,00** atau setara dengan **98.64 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **92.196.090,00**.

- Tunjangan Keluarga

Dengan total anggaran sebesar 682.340.452,00 dan realisasi sebesar 655.977.518,00 atau setara dengan 96.14% dan terdapat sisa pagu anggaran 26.362.934,00.

- Tunjangan Jabatan

Dengan total anggaran sebesar 397.821.950,00 dan realisasi sebesar 384.080.000,00 atau setara dengan 96.55% dan terdapat sisa pagu anggaran 13.741.950,00.

- Tunjangan Fungsional

Dengan total anggaran sebesar **635.899.579,00** dan realisasi sebesar **485.794.000,00** atau setara dengan **76,39%** dan terdapat sisa pagu anggaran **150.105.579,00**.

- Tunjangan Umum

Dengan total anggaran sebesar **113.474.524,00** dan realisasi sebesar **111.015.000,00** atau setara dengan **97,83%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **2.459.524,00**.

- Tunjangan Beras

Dengan total anggaran sebesar **404.088.649,00** dan realisasi sebesar **391.792.200,00** atau setara dengan **96,96%** dan terdapat sisa pagu anggaran **12.296.449,00**.

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Dengan total anggaran sebesar **23.291.663,00** dan realisasi sebesar **15.024.842,00** atau setara dengan **64,51%** dan terdapat sisa pagu **8.266.821,00**.

- Pembulatan Gaji

Dengan total anggaran sebesar 113.706,00 dan realisasi sebesar 111.243,00 atau setara dengan 97,83%.

- Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Dengan total anggaran sebesar 70.515.808,00 dan realisasi sebesar 671.017.342,00 atau setara dengan 87,09% dan terdapat sisa pagu anggaran 55.490.966,00.

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Dengan total anggaran sebesar **15.279.238,00** dan realisasi sebesar **13.758.224,00** atau setara dengan **90,05%** dan terdapat sisa pagu anggaran **1.521.014,00**.

- Iuran Jaminan Kematian ASN

Dengan total anggaran sebesar **45.839.030,00** dan realisasi sebesar **41.274.890,00** atau setara dengan **90,04%**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS

Dengan total anggaran sebesar **7.859.001.624,00** dan realisasi sebesar **7.780.977.514,00** atau setara dengan **99.01%** dan terdapat sisa pagu anggaran **78.024.110,00**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS

Dengan total anggaran sebesar 455.713.499,00 dan realisasi sebesar 430.449.069,00 atau setara dengan 94.46% dan terdapat sisa pagu anggaran 25.264.430,00.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS

Dengan total anggaran sebesar **1.344.983.373,00** dan realisasi sebesar **1.297.965.395,00** atau setara dengan **96.50%** dan terdapat sisa pagu anggaran **47.017.978,00**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Dengan total anggaran sebesar **7.190.434.868,00** dan realisasi sebesar **7.022.004.381,00** atau setara dengan **97.66%** dan terdapat sisa pagu anggaran **168.430.487,00**.

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Dengan total anggaran sebesar **556.812.000,00** dan realisasi sebesar **548.412.000,00** atau setara dengan **98.49%** dan terdapat sisa pagu anggaran **8.400.000,00**.

Tabel 2 : Ikhtisar Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
<i>Belanja Operasi</i>	35.376.353.110,00	32.517.066.130,00	91,92
Belanja Pegawai	27.436.768.874,00	26.532.474.269,00	96,70
Belanja Barang dan Jasa	7.939.584.236,00	5.984.591.861,00	75,38
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	2.285.740.804,00	2.055.400.000,00	89,92
Jumlah Belanja Langsung	37.662.093.914,00	34.572.466.130,00	91,80

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal.

Berikut ini akan dibahas uraian tentang anggaran definitif masing-masing kegiatan yang termasuk dalam komponen biaya langsung yaitu:

I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.327.620,00	176.900.796,00	97,56
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.855.620,00	73.034.702,00	95,03
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.4472.000,00	103.866.094,00	99,42
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.436.947.874,00	26.532.842.609,00	96,70
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.879.956.874,00	25.984.430.609,00	96,67
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.991.000,00	548.412.000,00	98,46
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.664.000,00	16.715.096,00	89,56
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.664.000,00	74.878.243,00	89,56
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	814.786.104,00	787.284.817,00	96,62
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kanto	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.537.772	23.220.000,00	98,65
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.948.420	60.207.500,00	77,24
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.060.000,00	62.480.000,00	94,58
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	194.631.800,00	194.435.000,00	99,90
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.664.000,00	30.202.800,00	95,39
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.944.112,00	416.739.517,00	99,00

	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.323.322.326,00	2.034.261.824,00	87,56
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.769.581.822,00	1.627.986.224,00	92,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	553.740.524,00	406.275.600,00	73,37
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.084.155.424,00	2.014.895.813,00	96,68
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.247.610,00	10.920.000,00	97,09
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.907.824,00	2.003.975.813,00	96,67
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	532.845.850,00	343.114.200,00	64,39
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.624.710,00	313.464.200,00	98,69
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.970.010,00	29.650.000,00	95,74
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.251.150,00	0,00	0,00
TOTAL		33.392.049.198,00	31.906.015.155,00	95,55

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 33.392.049.198,00** dan realisasi sebesar **Rp. 31.906.015.155,00** atau setara dengan **95,55%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.486.034.043,00**. Terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan capaian rata-rata di atas 90% atau berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.486.034.043,00**. Tetapi untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu Rp184.251.150,00 dengan realisasi Rp0,00 karena ketersediaan dana anggaran di kas daerah tidak cukup maka Tunda Bayar di Tahun 2025.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	366.213.910,00	355.188.472,00	96,99
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	366.213.910,00	355.188.472,00	96,99
TOTAL		366.213.910,00	355.188.472,00	96,99

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 366.213.910, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 355.188.472,00** atau setara dengan **96,99%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 11.025.438,00**.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	50.720.600,00	50.720.600,00	100
	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	50.720.600,00	50.720.600,00	100
TOTAL		50.720.600,00	50.720.600,00	100

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 50.720.600, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 50.720.600,00** atau setara dengan **100 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 0,00**.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	214.235.911,00	151.298.245,00	70,62

	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911,00	151.298.245,00	70,62
TOTAL		214.235.911,00	151.298.245,00	70,62

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 214.235.911,00** dan realisasi sebesar **Rp.151.298.245,00** atau setara dengan 70,62% dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 62.937.666,00**.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi	181.589.541,00	177.987.091,00	98,02
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541,00	177.987.091,00	98,02
TOTAL		181.589.541,00	177.987.091,00	98,02

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 181.589.541,00** dan realisasi sebesar **Rp. 177.987.091,00** atau setara dengan **98,02%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 3.602.450,00**.

6. Program Pengelolaan Persampahan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,00	52.997.000,00	4,08

	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,00	52.997.000,00	4,08
TOTAL		1.298.306.000,00	52.997.000,00	4,08

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.298.306.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 52.997.000,00** atau setara dengan **4,08%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.245.309.000,00**. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian 4,08% atau berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan karena ketersediaan dana di kas daerah tidak ada maka tunda bayar

7. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.606.000,00	15.292.000,00	97,99
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.606.000,00	15.292.000,00	97,99
2	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00	384.177.286,00	90,36
	- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,00	384.177.286,00	90,36
3	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	117.248.000,00	14.996.000	12,79
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	117.248.000,00	14.996.000	12,79
4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	95.940.000,00	89.728.803,00	93,53
	- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	95.940.000,00	89.728.803,00	93,53

	dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun			
	TOTAL	653.980.300,00	504.194.089	73,66

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 653.980.300,00** dan realisasi sebesar **Rp. 504.194.089,00** atau setara dengan **73,66 %**. Dan terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 149.786.211,00.

8. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	676.393.167,00	615.510.878,00	91,00
	- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.725.167,00	585.448.878,00	90,81
	- Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	31.668.000,00	30.062.000,00	94,93
	TOTAL	676.393.167,00	615.510.878,00	91,00

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 676.393.167,00** dan realisasi sebesar **Rp. 615.510.878,00** atau setara dengan **91,00 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 60.882.289,00**.

II. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.913.112,00	89.265.700,00	52,67
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.883.500,00	50.500.000,00	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.329.500,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.173.800,00	10.265.200,00	84,32
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.601.812	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan/Material	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.280.000,00	5.120.000,00	96,97
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.444.500,00	23.380.500,00	91,89
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.887.800,00	71.978.341,00	42,52
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.637.800,00	71.978.341,00	85,04
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	0,00	0,00
3	Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00

	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
TOTAL		206.800.912,00	168.244.041,00	81,36

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 206.800.912,00** dan realisasi sebesar **Rp. 168.244.041,00** atau setara dengan **81,36 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 38.556.871,00**.

10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0
	- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD Laboratorium Lingkungan)	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Dengan total anggaran sebesar **Rp.0** dan realisasi sebesar **Rp. 0** atau setara dengan **0 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 0**.

III. UPTD KPHP UNIT I Karimun

11. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.431.700,00	22.514.500,00	76,43
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	872.700,00	858.000,00	98,32
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tanga	1.384.900,00	1.367.000,00	98,71
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.950.100,00	9.277.200,00	77,63
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.500,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan/Material	1.461.000,00	1.368.300,00	93,63
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.682.500,00	9.644.300,00	90,28
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.892.500,00	32.080.000,00	94,35
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.042.500,00	14.230.000,00	88,70
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00
1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	0,00	0,00	0,00
	- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0,00	0,00	0,00
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30.000.000,00	29.850.000,00	99,50

	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	30.000.000,00	29.850.000,00	99,50
TOTAL		90.324.200,00	84.444.500,00	93,49

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 90.324.200,00** dan realisasi sebesar **Rp. 84.444.500,00** atau setara dengan **93,49 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 5.879.700,00**. ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu : Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

IV. UPTD KPHL II BATAM

12. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.813.855,00	25.474.750,00	96,34
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.097.200,00	1.068.00,00	97,34
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.533.100,00	1.489.000,00	97,12
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.883.000,00	11.877.650,00	99,95
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	992.155,00	935.100,00	94,25
	- Penyediaan Bahan/ Material	890.400,00	798.000,00	89,62
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.320.000,00	1.280.000,00	96,97
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.089.000,00	8.027.000,00	99,12

2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.929.600,00	37.898.617,00	99,29
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.042.600,00	17.743.617,00	98,34
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000,00	19.655.000,00	99,52
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	42.500.000,00	42.237.200,00	99,38
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	42.500.000,00	42.237.200,00	99,38
TOTAL		106.606.455,00	105.610.567,00	99,07

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 106.606.455,00** dan realisasi sebesar **Rp. 105.610.567,00** atau setara dengan **99,07%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 995.888,00**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap 90 % keatas.

V. UPTD KPHP UNIT III LINGGA

13. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.521.227,00	25.191.000,00	44,02
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.903.000,00	20.004.000,00	74,36
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	892.427,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan/Material	607.800,00	0,00	0,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.118.000,00	5.187.000,00	72,87
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.641.573,00	1.258.280,00	64,86
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.391.573,00	1.008.280,00	29,73
3	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	30.000.000,00	28.050.000,00	93,50
	- Pencegahan dan Pembatasan kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit III Lingga)	30.000.000,00	28.050.000,00	93,50
TOTAL		69.162.800,00	54.499.289,00	78,80

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 69.162.800,00** dan realisasi sebesar **Rp. 54.499.289** atau setara dengan **78,80%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 14.663.520,00**. ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI. UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.637.160,00	33.947.739,00	98,34
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.809.160,00	23.203.500,00	97,46
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.828.000,00	10.744.239,00	99,23
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.266.600,00	24.425.500,00	96,67
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.266.600,00	24.425.500,00	96,67
3	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	42.500.000,00	42.240.800,00	99,39
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	42.500.000,00	42.240.800,00	99,39
TOTAL		102.403.760,00	100.614.039,00	98,25

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 102.403.760,00** dan realisasi sebesar **Rp. 100.614.039,00** atau setara dengan **98,25%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.789.721**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap 90 % keatas.

VII. UPTD KPHP UNIT V NATUNA

15. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.067.900,00	28.967.243,00	88,31
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.822.000	4.014.850	68,96
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.248.900	12.160.000	91,78
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.041.000	975.000	93,66
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.956.000	11.817.393	98,8
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.739.480,00	32.702.995,00	94,22
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.739.480,00	9.702.995,00	82,65
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	0,00	0,00	0,00
	- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit V Natuna)	0,00	0,00	0,00
4	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	45.000.000,00	44.914.800,00	99,81
TOTAL		111.807.380,00	106.585.038,00	95,33

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 111.807.380,00** dan realisasi sebesar **Rp. 106.585.038,00** atau setara dengan 95,33% dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 5.222.342,00**. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal atau 68,96% yaitu : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

VIII. UPTD KPHP UNIT IV KEPULAUAN ANAMBAS

16. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.219.100,00	3.169.875,00	98,09
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.480.000,00	98,47
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.286.000,00	9.990.000,00	97,71
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.494.680,00	14.285.600,00	86,61
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00,
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
	- Penyediaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit VI Anambas)	0,00	0,00	0,00

4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
TOTAL		141.499.780,00	138.925.475,00	98,18

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 141.499.780,00** dan realisasi sebesar **Rp. 138.925.475,00** atau setara dengan **98,18%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 2.574.305,00**.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Capaian Kinerja Program (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	366.213.910,00	355.188.472,00	96,99	100	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.392.049.198,00	31.906.015.155,00	97,56	100	
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0	0	0	0	
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	214.235.911,00	151.298.245,00	70,62	100	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.720.600,00	50.720.600,00	100	100	
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	181.589.541,00	177.987.091,00	98,02	0	
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0	0	
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.720.600,00	50.720.600,00	100	100	
10.	Program Pengelolaan Persampahan	1.298.306.000,00	52.997.000,00	4,08	100	
11.	Program Pengelolaan Hutan	653.980.300,00	504.194.089,00	73,66	81,66	
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	676.393.167,00	615.510.878,00	91,00	100	

No	Program	Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Capaian Kinerja Program (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
	di Bidang Kehutanan					
13.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	0	0	0	0	
	Jumlah	36.833.488.627,00	33.813.911.530,00	91,80	98,95	

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Sasaran

Indikator	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran ke-1 : Menurunknya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	0	0	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0	0	0	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	0	0	0	
	2. Program Perencanaaan Lingkungan Hidup	2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	
		Sub Kegiatan Pengisolasiyan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	
	3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	1. Kegiatan Penyeleenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	366.213.910	355.188.472	96,99	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Memobilkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	366.213.910	355.188.472	96,99	
	4. Program Perlindukan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	214.235.911,-	151.298.245,-	70,62	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911,-	151.298.245,-	70,62	
	5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	50.720.600,-	50.720.600,-	100	

		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadilan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	50.720.600,-	50.720.600,-	100	
6. Program Pengelolaan Persampahan	1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,-	52.997.000,-	4,03		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Synchronisasi Penyebarluasan Prasara dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.298.306.000,-	52.997.000,-	4,03		
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari						
Percentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDnB	1. Program Pengelolaan Hutan	1. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.605.000,-	15.292.000,-	97,99	
	- Koordinasi dan Synchronisasi Pengembalian Izin Usaha atau Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.606.000,-	15.292.000,-	97,99		
	2. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,-	384.177.286,-	90,36		
	- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300,-	384.177.286,-	90,36		
	3. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	117.248.000,-	14.996.000,-	12,79		
	- Koordinasi, Synchronisasi dan Pelaksanaan Percegagan/Penanggulangan Kelakaran Hutan dan Lahan	117.248.000,-	14.996.000,-	12,79		
	4. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000,-	89.728.803,-	93,53		
	- Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000,-	89.728.803,-	93,53		
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan						
Nilai SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.327.620	176.900.796	97,56	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.855.620	73.034.702	95,03	100	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.472.000	103.866.094	99,42	100	
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.436.947.874	26.532.842.609	96,70	100	

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.879.956,874	25.984.430,639	96,57	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.991.000	548.412.000	98,46	100
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	814.786,104	787.284,817	96,62	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.537,772	23.220,000	98,65	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.948,420	60.207,500	77,24	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengondision	66.060,000	62.480,000	94,58	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	194.631,800	194.435,000	99,90	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.664,000	30.202,800	95,39	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.944,112	416.739,517	99,00	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	100
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.087.677,624	2.033.182,724	97,39	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.247,500	10.920,000	97,09	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.907,824	2.003.975,813	96,67	100
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Utusan Pemerintahan Daerah	4.10.249,000	404.321,700	98,56	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.624,700	313.464,200	98,69	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.970,000	29.650,000	95,74	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.251,150	0	0	0
6.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.564,000	16.715,096	89,56	240
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.564,000	16.715,096	89,56	100

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 37.662.093.914,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 35.376.353.110,- (yaitu terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp. 27.436.768.874,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.939.584.236,00 serta Belanja Hibah Rp. 0 dan belanja modal sebesar Rp. 2.285.740.804,- yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 34.572.466.130 atau sebesar 91,80%,

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tersedia melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 37.662.093.914,00 (Tiga Puluh Tujuh miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Peranfaatan Hutan Lestari, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan capaian realisasi indikator kinerja, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercakup dalam 8 program, 17 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 yang dapat dicapai dengan capaian 106,94 % dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,05 atau kategori "Sangat Baik".
2. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari dengan indikator Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku tercapai 26,29 dengan capaian kinerja 96,23% atau kategori "Baik"

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas kesimpulan hasil analisis pada Bab 3 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tetap lebih baik.
2. Perlu dilakukannya pemenuhan anggaran untuk sasaran strategis yang tidak tercapai
3. Pendanaan untuk Indikator Kinerja Utama sebaiknya tidak dilakukan refocusing karena mengingat hal tersebut merupakan indikator kinerja kepala Dinas yang membawa nama OPD tersebut.
4. Anggaran untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebaiknya dilakukan review kembali mengingat selama ini anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan frekuensi pemantauan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

5. Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan perihal pembukaan aplikasi SIPUHH untuk pembayaran PNBP atas pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan baku arang bagi Perusahaan produksi arang di Kab. Lingga dan Karimun agar PDRB Sektor Kehutanan meningkat.

Demikian, semoga laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah atau pihak lainnya yang berkepentingan sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2025

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



HENDRI, S.T

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008